

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Wilayah perairan Indonesia yang luas dengan sumber daya kelautan yang besar memiliki arti penting bagi Indonesia karena di dalamnya terkandung sumber daya perikanan yang memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru serta menjadi salah satu penggerak utama pembangunan nasional. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.499 pulau dari sabang hingga marauke. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km² yang terdiri dari 2,01 juta km² daratan, 3,35 juta km² lautan, dan 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Merupakan suatu negara dengan luas perairan lebih besar dari pada luas daratan, maka dari itu Indonesia disebut sebagai Negara Maritim (Perikanan, 2017). Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 6,4 juta ton pertahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia (KKP, 2018). Melimpahnya sumber daya perikanan yang ada di wilayah perairan Indonesia menyebabkan banyak menarik perhatian pihak asing untuk dapat menikmati sumber daya perikanan itu secara illegal melalui kegiatan *illegal fishing*.

Kegiatan *illegal fishing* dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga Indonesia yang memasuki kawasan laut Indonesia secara illegal. Dengan berbagai cara mereka dapat memasuki kawasan perairan Indonesia. Para nelayan asing yang kerap memasuki kawasan perairan Indonesia berasal dari Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Filipina (Kementerian Kelautan dan perikanan, 2015). Perairan Natuna, perairan Sulawesi Utara, perairan Maluku, dan juga Laut Arafura di Papua adalah kawasan yang rawan akan terjadinya kegiatan *illegal Fishing*. Kawasan tersebut rawan terjadi *illegal fishing*, karena di kawasan tersebut terkandung potensi sumber daya perikanan yang melimpah dan juga dikarenakan posisi geografis dari kawasan perairan Indonesia yang berbatasan langsung dengan perairan internasional maka sangat mudah bagi nelayan-nelayan asing untuk masuk

ke wilayah perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan dengan cara illegal.

Sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi kelautan yang besar, seharusnya Indonesia dapat memaksimalkan potensi kelautan tersebut bagi kemajuan pembangunan ekonomi nasional. Keadaan inilah yang membuat peluang bagi negara-negara lain untuk mengeksploitasi kekayaan laut Indonesia, khususnya kekayaan laut hayati, melalui cara-cara illegal.

Dengan adanya kegiatan *illegal fishing*, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pemberantasan, yaitu dengan melaksanakan penenggelaman kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Tindakan tersebut merupakan salah satu upaya negara untuk mengamankan kekayaan alam dan laut Indonesia. Aturan mengenai tindakan tersebut telah tercantum sejak tahun 2009 pada UU Tentang Perikanan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, 2009) dimana Pasal 69 ayat 4 UU tersebut menyatakan bahwa: “...penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan berupa pembakaran dan penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti yang cukup.”

Tabel 1.1

Data asal kapal illegal fishing yang ditenggelamkan tahun 2014-2018

Negara	Jumlah kapal yang ditenggelamkan
Thailand	23
Vietnam	263
Malaysia	73
Filipina	90
Total	449

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan 2019

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kapal-kapal yang melakukan penangkapan ikan secara illegal dan telah ditenggelamkan

sebanyak 449 kapal sepanjang Oktober 2014-Agustus 2018 seperti terlihat pada tabel di atas. Dari jumlah tersebut, terbanyak dari negara Vietnam dengan jumlah 263 kapal, kemudian diikuti Filipina 90 kapal di posisi kedua, Malaysia 73 kapal di posisi ke tiga dan Thailand 23 kapal di posisi ke empat. Dalam menjaga integritas wilayah dan populasi ikan di perairan wilayah Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah kepemimpinan Susi Pudjiastuti menindak tegas kapal-kapal yang melakukan penangkapan ikan secara illegal.

Dengan adanya kebijakan penenggelaman tersebut menimbulkan respon-respon dari Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Thailand terhadap kebijakan penenggelaman kapal. Berbagai respon diutarakan oleh negara-negara tersebut. Negara-negara tersebut merespon kebijakan penenggelaman kapal milik Indonesia berpedoman pada ASEAN Values.

Menurut Indonesia kebijakan penenggelaman kapal tersebut tidak akan mengganggu hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara tetangga, khususnya negara yang kapalnya banyak ditenggelamkan, bahkan mereka menghargai ketegasan Indonesia yang merefleksikan keseriusan Indonesia mengatasi kegiatan *illegal fishing* (VOA, 2018).

1.2 Perumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini akan menjelaskan “Mengapa negara-negara asing tetap menjalin hubungan yang baik dengan Indonesia walaupun ada kebijakan penenggelaman kapal?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum: Memahami mengapa negara-negara asing tidak memberontak dengan adanya kebijakan penenggelaman kapal oleh pemerintah Indonesia.

Tujuan khusus: menjelaskan Korelasi asean values dalam respon negara terkait kebijakan penenggelaman kapal.

1.4 Kegunaan Penelitian

Meninjau tujuan penelitian yang ditulis di atas, penelitian ini dapat berkontribusi secara akademis maupun secara praktis. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi dalam ilmu Hubungan Internasional dengan fokus penelitian pada Teori Konstruktivisme. Sedangkan secara praktis, penelitian ini berkontribusi untuk Menambah ilmu pengetahuan dan memberikan pemahaman bagi masyarakat pada umumnya dan akademisi pada khususnya mengenai kebijakan penenggelaman kapal dan ASEAN Values.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena di penelitian-penelitian sebelumnya belum membahas mengenai respon-respon negara asing khususnya Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Thailand yang mengacu pada ASEAN Values terhadap kebijakan penenggelaman kapal yang di terapkan oleh Indonesia.

Penelitian ini akan menggunakan teori konstruktivisme dalam menganalisis isu tersebut dan menggunakan konsep identitas dan norma yang menjadi acuan bagi penelitian ini.

Penelitian-penelitian terdahulu yang peneliti kumpulkan yang berkaitan dengan kebijakan penenggelaman kapal yang telah dilakukan sebelumnya dan dijadikan sebagai referensi penulis dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

No	Peneliti/Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Mansur Juned, Galby Rifqi Samhudi, dan Rahmat Aming Lasim / 2016	The Impact Indonesia's Sinking of Illegal Fishing Ship on Major Southeast Asia Countries	Penggunaan konsep neoralisme belum menjawab keseluruhan permasalahan, karena kemampuan TNI AL dalam menjaga belum sebaik negara-negara lainnya
2	Denandro Yusuf / 2018	The perspective of International	Menjelaskan apa dampak dari kebijakan penenggelaman kapal-

		Law on the Sinking of Illegal Fishing Vessels in the International Territory	kapal asing di Indonesia dalam perspektif hukum Indonesia
3	David Putra Setyawan / 2014	Analisis Tindakan Khusus Penenggelaman Kapal Asing sebagai Bentuk <i>Deterrence Effect</i>	Menjelaskan tentang upaya Indonesia untuk meningkatkan efek <i>deterrence</i> atau daya tangkal terhadap pelanggaran wilayah yang dapat merugikan dan mengancam kedaulatan negara

Dalam menganalisis konflik ini, penulis menggunakan Teori Konstruktivisme. Konstruktivisme hadir pada ilmu korelasi internasional saat Nicholas Onuf memperkenalkan Konstruktivisme pada tahun 1989. Konstruktivisme mulai diperkenalkan pada hubungan Internasional oleh Nicholas G. Onuf pada karyanya yang berjudul *World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations*. Nicholas G. Onuf berkata bahwa empiris tercipta secara sosial. Empiris ialah dari proses hubungan antar-aktor sebagai akibatnya melahirkan pemaknaan bersama (Onuf, N. G, 1989). Berdasarkan Nicholas G. Onuf teori konstruktivisme bukan struktur sosial yg menentukan perilaku aktor, bukan struktur sosial yang menentukan perilaku aktor, bukan perilaku agen yang menciptakan struktur sosial, tapi baik agen maupun struktur sama – sama saling membangun satu sama lain (Onuf, N. G, 1989).

Konstruktivisme beranggapan bahwa pengetahuan ialah hasil dari konstruksi manusia. Manusia mengkonstruksi pengetahuan mereka melalui hubungan manusia dengan objek, kenyataan, pengalaman, serta lingkungan. Bagi konstruktivisme, pengetahuan tidak bisa ditransfer begitu saja berasal seseorang pada orang lain. Pengetahuan bukanlah suatu hal yang telah ada, melainkan wajib melalui proses yang terjadi terus-menerus.

Setidaknya ada dua gagasan kunci konstruktivisme yang relevan bagi studi korelasi Internasional. Pertama, struktur-struktur yang menyatukan umat manusia lebih ditentukan oleh *shared ideas* (gagasan-gagasan yang diyakini bersama) daripada kekuatan material. Keyakinan tadi merepresentasikan perspektif idealis yang pernah mendominasi disiplin Hubungan Internasional terutama sebelum perang dunia II dua, identitas dan kepentingan aktor-aktor lebih ditentukan oleh *shared ideas* daripada faktor-faktor alam. Artinya tindakan setiap aktor tidak semata-mata dipengaruhi oleh motif, alasan serta kepentingan mereka tapi lebih dibentuk oleh hubungan antar individu dalam lingkungan di sekitarnya (struktur sosial, politik, ekonomi, dan budaya). Dengan begitu perspektif ini mewakili aliran strukturalisme pada teori konstruktivisme (M. Rosyidin, 2015).

Gagasan tersebut sangat bersifat dinamis serta sebagai variabel yang berimplikasi pada cara aktor melihat diri serta lingkungannya. Pada konteks ini aktor-aktor pada ranah hubungan internasional menentukan identitasnya, kepentingan serta tindakan aktor. Andrew Bradley Philips tegas menulis: “....., *constructivists focus on the role played by ideational factors...*” (Phillips, 2007). Hakekat manusia dari konsepsi konstruktivisme lebih bersifat bebas serta terhormat sebab dapat menolak atau mendapatkan sistem internasional, menghasilkan kembali contoh relasi yang saling menguntungkan, atau yang diinginkan sesuai peraturan, strukturasi dan *verstehen* pada *speech acts*.

Selain itu, teori konstruktivisme dibentuk berdasarkan tiga poin utama. Pertama mengenai pentingnya struktur inspirasi pada pembentukan sikap aktor sosial dan politik. Dari konstruktivis, struktur material saja tidak cukup untuk menghasilkan sikap aktor. Dengan adanya nilai, inspirasi, serta norma yang sebagai suatu struktur yang diyakini dapat menghasilkan perilaku serta perilaku manusia. Konstruktivis percaya bahwa nilai serta pandangan baru inilah yang mempunyai dampak besar pada membuat tindakan politik yang diambil oleh aktor (Wendt, 1998). Poin kedua ialah bahwa struktur non-materiil mensugesti identitas aktor yang lalu mensugesti kepentingan serta tindakan aktor. Tidak selaras dengan para

rasionalis yang hanya membahas bagaimana suatu kepentingan bisa dicapai, konstruktivis melihat pentingnya memahami bagaimana kepentingan terbentuk.

Berdasarkan konstruktivisme, pemahaman atas terbentuknya kepentingan aktor sangat krusial untuk mengungkapkan berbagai kenyataan politik yang gagal dijelaskan oleh rasionalis. Poin terakhir atau ketiga ialah keyakinan konstruktivis bahwa aktor/agen dan struktur saling mensugesti satu sama lain. Maksudnya disini ialah, struktur akan mensugesti identitas, kepentingan serta sikap agen. Sementara agen juga bisa menghasilkan struktur sesuai dengan identitas dan kepentingan yang dimiliki.

Hal ini ditentukan atau dipengaruhi oleh struktur itu sendiri yang tak bisa terbentuk tanpa adanya agen yang membentuk atau tanpa adanya pandangan baru yang menjadi struktur. Sementara itu agen tak akan mempunyai identitas atau pandangan baru atau nilai tanpa adanya struktur yang membentuknya (Checkel, 2008). Dengan begitu, konstruktivisme berkembang melalui tiga varian utama, yaitu: Konstruktivisme Sistemik, Level Unit, serta holistik (Reus-Smit, 2002). Konstruktivisme Sistemik memiliki kecenderungan dengan teori neorealisme yang mana memberikan perhatian di hubungan anatar negara, negara menjadi aktor tunggal serta mengabaikan seluruh proses yang berlangsung pada masing-masing aktor tadi. Konstruktivisme Level Unit berfokus di korelasi antar tata cara-tata cara sosial serta legal dan identitas, kepentingan dari aktor negara. Sedangkan Konstruktivisme holistik sebagai penghubung antara konstruktivisme sistemik serta konstruktivisme level unit yang mencoba menyatukan perbedaan domestik dan internasional menjadi dua sisi dari sebuah tatanan sosial serta politik. Nilai yang dianut oleh suatu aktor / identitas tertentu ialah dasar dalam melakukan tindakan/respon. Konsep identitas dan norma termasuk kedalam varian Konstruktivisme Level Unit.

Ada pula beberapa perkiraan dasar pada teori konstruktivisme. Pertama, dunia sosial bukanlah suatu hal yang given tapi ada konstruksi yang dilakukan oleh individu atau negara. Kaum konstruktivisme mempunyai pemikiran bahwa dunia

sosial bukanlah suatu hal yang sama dengan ilmu alam. Hal ini terjadi karena, pada ilmu hubungan internasional setiap negara memiliki dampak satu sama lain dan negara pula terikat di masyarakat. kedua, konstruktivisme menduga bahwa identitas ialah suatu hal yang krusial. Identitas pula bukanlah suatu hal yang timbul dengan sendirinya akan tetapi merupakan suatu hal yg telah terkonstruksi dari kultur serta tata cara dalam suatu negara. Kultur ini pula memegang peranan penting pada membentuk cara pandang suatu negara terhadap aneka macam konflik yang ada. misalnya, negara-negara ASEAN (Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand) yang tentunya mempunyai identitas serta cara pandang yg tidak sama dalam merespon kebijakan penenggelaman kapal yang diberlakukan oleh Indonesia. Ketiga, proses yang terjadi pada korelasi internasional bukanlah suatu hal yang *stagnan* (tidak beranjak) melainkan *continue* (berkelanjutan). Tidak sama dengan pandangan kaum tradisionalis yang berpandangan bahwa kondisi anarki ialah suatu takdir yang tidak bisa dipengaruhi, konstruktivis menduga bahwa kondisi anarki terkonstruksi karena adanya hubungan yang terjalin antar negara yang terdapat pada sistem internasional tersebut.

Tokoh lain yang berpengaruh pada perkembangan teori konstruktivisme ialah Alexander E. Wendt. Dalam bukunya yang berjudul *Anarchy is What States make of It*. Alexander E. Wendt menyebutkan melalui perspektif ciri-ciri (*identity perspective*) yg penekanan tidak hanya pada hubungan fisik tapi juga pada sosial serta komunikasi (A. Wendt, 1992). Alexander E. Wendt menggunakan konstruktivisme untuk menentang teori neoralisme milik Kenneth Waltz yang mana dari perspektif neoralisme, keadaan anarki sempurna selalu menunjuk di apa yang diklaim dengan “*self-help*”. Alexander E. Wendt beropini bahwa teori neoralisme artinya teori yang gagal pada menjelaskan perubahan struktural antar aktor.

Pada dasarnya, Wendt beranggapan bahwa hubungan antar negara berada pada sistem yg anarki. namun, berdasarkan Alexander E. Wendt, anarki tidak perlu atau tidak selalu mengarah pada *self-help*. Alexander E. Wendt menyampaikan tiga tipe ideal berasal dari anarki untuk menemukan kultur mirip yang telah berkembang. Ketiga tipe tadi ialah Hobbesian, Kantian, dan Lockean (Wendt,

1999). pada kultur Hobbesian, negara melihat negara lain menjadi musuh, serta perang ialah segalanya atau dianggap “*war of all against all*”, permasalahan kekerasan ialah cara untuk bertahan hidup. pada kultur Kantian melihat satu sama lain sebagai sahabat, dimana tidak terdapat permusuhan serta bila terjadi perselisihan diselesaikan menggunakan cara damai, dan saling mendukung satu sama lainnya. Sedangkan dalam kultur Lockean negara menduga negara yang lain menjadi saingan, tapi tidak berusaha untuk memusnahkan satu sama lain, mereka mengakui hak negara lain untuk tetap berdiri (Wendt, 1999).

Berkaitan dengan pembagian kultur tadi, teori konstruktivisme milik Alexander E. Wendt ini memiliki beberapa prinsip dasar. Alexander E. Wendt beropini bahwa elemen krusial dari korelasi internasional adalah sebuah gagasan bukan unsur material. Namun, bukan berarti unsur material dihilangkan, tapi tidak lebih krusial bila dibandingkan dengan gagasan atau ide.

Berkembang dari perkiraan tersebut, identitas merupakan salah satu konsep yang ada pada teori konstruktivisme. Identitas serta kepentingan aktor-aktor hubungan internasional juga terbentuk dari gagasan tersebut. Konsep identitas pula dismapaikan oleh Alexander E. Wendt dalam bukunya yang berjudul *Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics*. Alexander E. Wendt mengatakan bahwa “*identities are the basis of interest*”, ciri-ciri suatu negara dapat mempengaruhi kepentingan negara pada mengambil keputusan dalam memilih suatu tindakan. Alexander E. Wendt menekankan bahwa “*Actors use ideas to construct relationships and material reality. So ideas precede negotiations and interpret history to make relationships either conflictual or cooperative*” (Asrudin & Suryana, 2009:48).

Berdasarkan Alexander E. Wendt, struktur sosial dan sistem sosial mengandung tiga elemen yang penting, yaitu syarat material, kepentingan serta pandangan baru-inspirasi. Kondisi material dipengaruhi oleh kepentingan serta kepentingan akan ditetntukan oleh pandangan baru-pandangan baru. Maka dari itu setiap elemen akan selalu berhubungan satu sama lain. Ciri-ciri dalam

konstruktivisme diharapkan menjadi variabel independen (Wendt, 1992). lalu Alexander Wendt membagi konsep identitas menjadi empat bagian, yaitu identitas korporat, identitas tipe, identitas peran, serta identitas kolektif. Yang dimaksud dengan identitas korporat ialah atribut-atribut negara yang relative statis serta mendefinisikan “siapa” negara tersebut. Sedangkan identitas tipe merujuk pada sistem politik atau pemerintahan yang dianut oleh suatu negara. Lalu identitas peran dikaitkan dengan posisi atau tanggung jawab negara atas hubungannya dengan negara lain. Sedangkan identitas kolektif ialah esamaan atribut antar negara yang membentuk mereka berperilaku layaknya tim (Wendt, 1999).

Berdasarkan Alexander E. Wendt, pembentukan identitas nasional terjadi di level negara, akan tetapi hal tadi pula ditentukan oleh struktur internasional. Pada lingkup internasional, setiap negar mendefinisikan batas-batas diri mereka serta batas-batas negara lainnya untuk bisa saling mengkonsolidasikan sifat-sifat nasional tersebut. Peter Katzenstein mengungkapkan lebih lanjut, bahwa identitas nasional mensugesti kebijakan melalui penentuan kepentingan nasional, tapi hal tadi bisa juga menghasilkan kebijakan secara lnsung sebagai hasil dari identitas negara (Katzenstein, 1996 p. 19).

Bagi kaum konstruktivisme, kaum rasionalis (baik realis maupun liberalis) terlalu menyadarkan diri pada kepentingan materi serta *agen centric*. Oleh karena itu, kemunculan konstruktivisme merubah pemilahan pendekatan pada studi hubungan Internasional dari trikotomi menjadi dibagi dua, yaitu dari tiga aliran Liberalisme, Realisme serta Marxsisme Strukturalisme menjadi Rasionalisme (Liberalisme, Realisme, dan Marxsisme Strukturalisme) di satu sisi serta di sisi lain ialah Konstruktivisme (Hobson, 2000). Disparitas terletak pada negara yang sama sekali tidak mempunyai kepentingan bawaan (*given interest*), bagi kaum realist kepentingan ini selalu berupa kekuasaan. Pandangan Konstruktivis, negara sama sekali tidak mempunyai *given interest* sebab negara terkungkung oleh struktur sosial yang normative. Bahkan negara diklaim tidak mungkin *exist*. Negara saling mengenali satu dengan yang lain melalui asosiasi yang dijalin dengan negara lainnya (Nau, 2009).

Selain konsep identitas, norma ialah salah satu konsep penting pada teori konstruktivisme. Konsep norma tersebut dijelaskan oleh Martha Finnemore pada bukunya yang berjudul *National Interest in International Society*. Martha Finnemore berfokus pada tata cara masyarakat internasional serta bagaimana norma tersebut dapat mensugesti identitas dan kepentingan. Norma ialah salah satu pedoman serta nilai yang tertanam dalam masyarakat tentang tindakan sosial apa yang dikategorikan sebagai tindakan normal, dalam arti apa saja yang sah serta apa yang galat pada suatu kelompok atau unit tertentu.

Selain itu, tindakan serta perilaku negara sering ditentukan oleh identitas dan kepentingan. Tapi identitas serta kepentingan didefinisikan oleh kekuatan internasional. tata cara-istiadat rakyat internasional tersebut lalu ditransmisikan ke negara melalui organisasi internasional. Organisasi internasional menghasilkan kebijakan nasional dengan ‘mengajari’ negara apa saja yang seharusnya menjadi kepentingan nasional mereka. Secara umum, norma diciptakan untuk mengatur sikap anggota masyarakat supaya tercipta ketertiban sosial.

Kaum konstruktivisme kemudian mencoba untuk mengadopsi konsep adat ke dalam studi hubungan internasional serta mendefinisikannya menjadi ‘asa-asa bersama yang dianut oleh sekumpulan aktor mengenai sikap yang pantas (Rosyidin, 2015, p. 71). Dipandang dari wujudnya, norma terbagi menjadi dua jenis, yaitu norma tertulis dan tidak tertulis. Martha Finnemore beropini bahwa norma-norma internasional yang diangkat serta dipromosikan oleh organisasi internasional bisa mensugesti pedoman nasional dengan mendorong negara-negara untuk ikut serta mengadopsi norma-norma tersebut ke dalam kebijakan mereka. Lain hal menggunakan neoralisme, Martha Finnemore juga beropini bahwa tidak seluruh masalah bisa dijelaskan oleh kepentingan nasional dalam konteks kekuasaan maksimum. Hal-hal mirip itu perlu dijelaskan dengan analisis konstruktivisme yang menekankan pentingnya kiprah norma pada dalam tatanan warga internasional (Finnemore, 1996).

Dengan begitu identitas negara terkonstruksi oleh adat serta kemudian menghasilkan kepentingan-kepentingan tertentu. norma yang terdapat bahkan mampu merekonstruksi identitas, dengan demikian maka kepentingan pun berubah sejalan menggunakan hal tersebut serta akhirnya akan merubah kebijakan negara. Kaum Konstruktivis bersikap lebih lunak di kepentingan negara, karena mereka percaya bahwa perubahan identitas akan berpengaruh pada perubahan kepentingan negara yang sejalan menggunakan perubahan-perubahan struktur normatif.

1.5.1 Budaya dalam konstruktivisme

Konstruktivisme merupakan salah satu perspektif dominan dalam Hubungan Internasional selain realisme dan liberalisme. Konstruktivisme sejatinya bukan merupakan teori Hubungan Internasional, seperti halnya realisme dan liberalism yang lahir dari ilmu politik, induk ilmu Hubungan Internasional. Konstruktivisme merupakan seperangkat pemikiran yang diadopsi dari disiplin sosiologi dan psikologi sosial. Oleh karena itu, kaum konstruktivisme melihat dunia secara khas yang membedakannya dengan teori-teori lainnya. Konsep-konsep yang menjadikan senjata andalan kaum konstruktivisme untuk memahami dunia juga sepenuhnya dipinjam dari sosiologi. Nilai, norma, peraturan, identitas, dan juga budaya merupakan beberapa konsep kunci yang dapat digunakan pada studi Hubungan internasional dalam menganalisis realitas internasional yang tidak dapat dijelaskan dengan teori-teori Hubungan Internasional lainnya (Mohamad Rosyidin, n.d.).

Berbicara mengenai budaya kaum Konstruktivisme menitik beratkan pada proses perolehan pengetahuan yang efektif melalui pengalaman. Kaum konstruktivisme memandang bahwa budaya merupakan struktur sosial yang berlaku sebagai variabel pengaruh (*constraining variabel*) bagi tindakan aktor. Budaya atau kultur tidak hanya dipahami sebagai warisan akan tetapi budaya dipahami sebagai pemahaman kolektif masyarakat baik di masa lalu maupun masa sekarang. Berbicara mengenai budaya tidak hanya terbatas pada adat melainkan lebih sebagai “kode tata berperilaku” (*code of conduct*) budaya dapat

mempengaruhi bagaimana masyarakat bertindak ketika menghadapi suatu persoalan (Mohamad Rosyidin, n.d.). Sebagai contohnya budaya ASEAN yang tidak menolerir adanya peperangan dan memilih perdamaian mempengaruhi Negara ASEAN (Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Thailand) dalam bertindak terhadap kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Kebudayaan adalah pengetahuan mendasar bagi setiap manusia. Emst Von Glassefeld (1989) konstruktivisme adalah sebuah teori yang berakar pada filsafat, dan psikologi (Glassefeld, 1989).

Kebudayaan adalah nilai-nilai yang diajarkan sejak dini, dari lingkup keluarga. Pengalaman dalam memperoleh pengetahuan berupa kebudayaan diajarkan dari orang terdekat. Tidak hanya itu, pengetahuan yang berupa kebudayaan juga merupakan dasar karakter seseorang yang dibentuk sejak dini.

Sedangkan dalam lingkup negara, budaya adalah hal yang menjadi ciri khas. Karakter budaya dibentuk dari nilai kebudayaan yang sudah ditanam sejak dahulu hingga menjadi identitas negara. Kebudayaan tersebut melewati proses yang sangat panjang, sehingga bisa dikatakan sebagai ciri khas bangsa. Nilai-nilai dari kebudayaan kemudian diwariskan secara turun temurun kepada para penerus bangsa.

Budaya dipandang sebagai salah satu cara yang ampuh untuk meneruskan misi perdamaian atau salah satu cara untuk menyampaikan ideologi dari satu negara ke negara lain. Definisi budaya itu sendiri adalah sebuah kebiasaan yang diciptakan oleh manusia sebagai komunitas masyarakat yang didalamnya terdapat orang-orang yang saling berinteraksi satu sama lain, atau sejumlah kelompok sosial yang berbagi wilayah, bersubjek otoritas politik yang sama dan pengharapan budaya dominan.

Seiring berkembangnya zaman, nilai-nilai kebudayaan terus mengalami perkembangan. Ditambah lagi, semakin mudahnya media informasi diakses oleh

semua kalangan. Media informasi kemudian membentuk budaya baru dan menggeser budaya lama, atau menjadikan budaya lama tampak berbeda.

Konstruktivisme merupakan salah satu cara untuk menganalisa berbagai jenis fenomena kebudayaan yang terjadi. Konstruktivisme menggaris bawahi pentingnya proses pengalaman individu dalam memahami setiap fenomena yang ada.

Budaya dipandang sebagai sebuah cara. Budaya merupakan hal yang penting dalam melakukan diplomasi. Di dalam dunia diplomasi, budaya merupakan sumber kekuatan (nasional). Budaya merupakan salah satu sumber kekuatan lunak (*soft power*) dan perannya tidak kalah penting dari kekuatan keras (*hard power*).

Budaya penting dalam mempengaruhi kebijakan, respon dari negara-negara asing (Vietnam, Filipina, Malaysia, Thailand) tidak dapat dipisahkan dari budaya yang dianutnya. Budaya yang dimaksud disini adalah budaya strategis (*strategic culture*), yaitu sistem simbol seperti aksioma, analogi, metafora, yang sudah ada sejak lama dan mempengaruhi bagaimana negara bertindak.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konsep

Definisi konsep dibutuhkan dalam sebuah penelitian untuk memberikan batasan pada pengertian dari variabel-variabel penelitian yang memiliki tujuan agar pembahasan masalah tidak kabur, karena tidak jelasnya variabel penelitian yang ada definisi konsep dari variabel-variabel tersebut yaitu sebagai berikut:

1. ASEAN Values

ASEAN Values di sini diartikan sebagai prinsip-prinsip atau nilai yang terdapat di ASEAN. ASEAN Values ini merujuk kepada nilai moral, nilai moneter, dan kepentingan. ASEAN memiliki tujuan agar mampu memelihara kerja sama yang erat.

2. Kebijakan penenggelaman kapal

Kebijakan penenggelaman kapal merupakan salah satu kebijakan yang di terapkan oleh Indonesia dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku tindak *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia.

1.6.2 Definisi Operasional

Definisi Operasional dibutuhkan dalam penelitian, dengan tujuan agar suatu konsep yang abstrak dapat diukur. Terdapat definisi operasional dari variabel-variabel penelitian tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. ASEAN Values

ASEAN Values merupakan prinsip-prinsip yang menjadi tolak ukur negara-negara anggota ASEAN dalam bertindak. Dalam hubungan satu sama lain antar anggota harus dipandu oleh prinsip-prinsip dasar yaitu:

- a. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, keutuhan wilayah, kesetaraan, serta identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN;
- b. Hak untuk setiap negara memimpin eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan negara lain;
- c. Tidak saling ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain;
- d. Penyelesaian perbedaan dan perselisihan dilakukan dengan cara damai tidak dengan kekerasan apalagi dengan peperangan;
- e. Kerjasama yang efektif antar negara anggota.

2. Kebijakan penenggelaman kapal

Kebijakan penenggelaman kapal merupakan salah satu kebijakan tegas yang diterapkan oleh Indonesia, agar pelaku-pelaku tindak *illegal fishing* tidak mengulang tindakan tersebut. Khususnya bagi kapal-kapal berbendera asing yang dengan sengaja melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, dimana Pasal 69 ayat 4 UU menyatakan bahwa

“Dalam melaksanakan fungsi pengawasan penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang pengawas perbatasan wilayah perairan Indonesia berhak atau wajib untuk memberikan sanksi berupa pembakaran atau penenggelaman kapal bagi para pelaku tindak *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia.

1.7 Argumen Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah, kerangka pemikiran dan asumsi yang dikemukakan diatas, penulis dapat menyusun suatu argumen penelitian sebagai berikut: “Budaya ASEAN berpengaruh dalam cara pandang negara-negara ASEAN terhadap kebijakan IUU Fishing Indonesia”.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah eksplanatif kualitatif, yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan dan pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Penelitian ini tidak hanya sekedar berhenti dalam penggambaran umum suatu fenomena, akan tetapi juga berusaha menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi dan apa dampaknya.

Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (2008) penelitian digolongkan menjadi tiga (Singarimbun, 2008), yaitu:

1. Penelitian Eksploratif

Penelitian yang bersifat terbuka, yang berusaha untuk menelusuri atau menggali ada tidaknya suatu masalah atau ingin mengetahui secara mendalam akan suatu masalah tertentu.

2. Penelitian Deskriptif

Penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu gejala sosial tertentu, dalam menghimpun fakta terdapat analisis tabel, analisis presentase, analisis deduktif-induktif, dan sebagainya.

3. Penelitian Eksploratori

Penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa. Penelitian ini bertujuan untuk menguji penelitian yang akan diajukan gua diterima atau ditolak.

Maka desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian dengan tipe Penelitian Kualitatif yaitu, menghasilkan kata-kata deskriptif secara tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Pada umumnya, penggunaan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik (menekankan pada pentingnya keseluruhan dan keterkaitan antar bagian-bagian yang membentuknya), memperbanyak pemahaman secara mendalam serta menemukan teori baru. Dalam penelitian ini akan dijelaskan Analisis respon negara-negara ASEAN dalam kebijakan penenggelaman kapal tahun 2014-2018.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan. Situs penelitian ini berada di wilayah perairan Indonesia.

1.8.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang digunakan sebagai subjek penelitian adalah negara-negara anggota ASEAN. Adapun subjek dari penelitian ini terdiri dari Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu, data yang berbentuk pendapat atau judgement sehingga tidak berupa angka, melainkan berupa kata atau kalimat (Suliyanto, 2006).

1.8.5 Sumber Data

Sumber data yang diperoleh penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian terdahulu, ataupun melalui media perantara seperti berita, *website* dan jurnal.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif, maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas, dan spesifik. Menurut Sugiyono (2009), pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi (Sugiyono, 2009).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumentasi yaitu, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian (Herdiansyah, H, 2010). Dokumen yang akan digunakan adalah artikel ilmiah, buku, informasi-informasi dari *website* Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, serta berita dari berbagai media resmi yang berkaitan dengan penelitian.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

1. Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogman dalam Sugiyono (2009) adalah proses mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan – bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuan yang didapatkan dengan mudah diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2009). Berdasarkan definisi

dias dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, interpretasi data dan triangulasi.

Untuk analisis data yang telah diperoleh dari berbagai sumber maka data tersebut diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data diseleksi dan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab masalah penelitian.
- b. Data diolah sesuai dengan masalah penelitian.
- c. Analisis data dengan menggunakan kata-kata yang sederhana sebagai jawaban terhadap masalah.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk narasi, yaitu berupa deskripsi dari fakta-fakta yang ada. Menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya. Melalui penyajian tersebut, maka akan terorganisasikan tersusun dalam pola, sehingga akan mudah untuk difahami.

3. Menarik kesimpulan

Penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009) kegiatan analisis ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dilakukan dalam penelitian ini berupa penarikan akhir setelah melakukan kesimpulan awal, karena kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan mengalami perubahan ketika ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya sesuai dengan topik penelitian.

Akan tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Dapat berupa deskripsi ataupun gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, maupun hipotesis atau teori.

1.8.8 Kualitas Data

kualitas data adalah bagian dari tata kelola data. Kualitas data berhubungan dengan konsistensi dan ketepatan waktu dan mengandung pengertian informasi sebagai output dari proses pengolahan data dari keadaan sebenarnya. Kualitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif.